

AKUNTABILITAS PENGELOLAAN LIMBAH BERBASIS MULAT SARIRA

Eka Siskawati
Made Susilawati

Politeknik Negeri Padang, Jl. Kampus Limau Manis, Limau Manis, Pauh, Padang 25164
Surel : ekasiskawati@gmail.com

<http://dx.doi.org/10.18202/jamal.2017.12.7067>



Jurnal Akuntansi Multiparadigma
JAMAL
Volume 8
Nomor 3
Halaman 427-611
Malang, Desember 2017
ISSN 2086-7603
e-ISSN 2089-5879

Tanggal Masuk:
21 Januari 2017
Tanggal Revisi:
21 November 2017
Tanggal Diterima:
31 Desember 2017

Abstrak: Akuntabilitas Pengelolaan Limbah Berbasis Mulat Sarira. Penelitian ini mencoba untuk menggali makna *mulat sarira* dalam konsep akuntabilitas pengelolaan limbah. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Penelitian ini menemukan bahwa konsep akuntabilitas berbasis *mulat sarira* pengelolaan limbah memberikan nilai *puputan*, THK, *jenyah*, *taksu*, *desa-kala-patra*, *saput poleng*, *ngayah*, hukum *karmaphala*, dan *paras paros*. *Mulat sarira* sebagai senjata pengendalian diri mampu membangkitkan kewaspadaan diri untuk tidak merusak hubungan dengan Tuhan, manusia, dan lingkungan. Dengan demikian, budaya *mulat sarira* merupakan konsensus dekonstruksi nilai keseimbangan dan keharmonisan yang melandasi pembangunan konsep akuntabilitas pengelolaan limbah.

Abstract: Mulat Sarira-based Accountability Waste Management. This research tried to explore the meaning of *mulat sarira* in the concept of waste management accountability. The research method used was descriptive qualitative. This study found that the concept of accountability based on multifarious *sarira* gives the value of *puputan*, THK, *embarrassment*, *taksu*, *village-kala-patra*, *polish*, *ngayah*, *karmaphala*, and *paros paros*. *Mulat sarira* as a weapon of self-control could awaken self-awareness to not damage relationships with God, human, and environment. Thus, the culture of *mulat sarira* was the consensus of the deconstruction of balance and harmony values which underlies the development of the concept of waste management accountability.

Kata kunci: akuntabilitas, *tri hita karana*, *mulat sarira*

Konsep akuntabilitas saat ini masih sangat sempit karena hanya fokus pada pertanggungjawaban dari manusia kepada manusia lain. Konsep akuntabilitas (seperti Bovens, 2007; Ebrahim, 2003; Koppel, 2005) belum merumuskan secara lebih detail gagasan yang berkaitan dengan perilaku aktor kepada unsur non-manusia, dan hanya fokus pada hubungan manusia dengan manusia. Konsep-konsep akuntabilitas telah dikembangkan untuk berbagai jenis institusi seperti konsep akuntabilitas untuk institusi publik dibangun berdasarkan kepentingan *stakeholder*, aktor, sifat kepentingan, dan jenis kewajiban pelaporan (Bovens, 2007). Pada organisasi nirlaba konsep akuntabilitas dirancang berdasarkan jenis pihak yang berkepentingan yaitu pihak prinsipal, pi-

hak internal organisasi, dan pihak penerima manfaat (Ebrahim, 2003). Sementara itu, untuk korporasi desain konsep akuntabilitas disusun berdasarkan dimensi nilai *transparency*, *liability*, *controllability*, *responsibility*, dan *responsiveness* (Muchlis & Sukirman, 2016). Konsep akuntabilitas ini belum mampu mengubah perilaku etika aktor terhadap pengelolaan lingkungan secara riil dan baik (*virtue*). Ini disebabkan masih sempitnya ruang lingkup akuntabilitas yang dikembangkan, sehingga kemudian berdampak pada level implementasi di mana praktik akuntabilitas hanya dilakukan sebatas pada penyajian laporan saja. Sempitnya konsep akuntabilitas yang dikembangkan menjadi penyebab perdebatan beberapa literatur yang mempermasalahkan masih terdapatnya gap

antara perilaku aktor dalam melaksanakan mekanisme akuntabilitas dengan ekspektasi masyarakat (Bovens, 2010). Seharusnya konsep akuntabilitas mendorong munculnya moral legitimasi pada aktor individu dan organisasi kepada seluruh lapisan *stakeholder* sehingga praktik akuntabilitas tidak hanya sebatas pada penyiapan laporan, yang diduga hanya dijalankan secara seremonial, melainkan juga sampai pada tahap penyiapan mekanisme aksi dan tindakan yang lebih bermoral dan beretika (Joannides, 2012; Overduin & Moore, 2017; Sullivan & Dwyer, 2009).

Praktik akuntabilitas yang dijalankan secara seremonial merupakan konsekuensi dari paradigma empirisme dan rasionalisme yang dikembangkan dari nilai-nilai budaya barat yang sangat bernuansa *antroposentrisme* (Byrch, Milne, Morgan, & Kearins, 2017). Oleh sebab itu, memasukkan nilai-nilai moral (Bebbington & Larrinaga, 2014) ke dalam konsep akuntabilitas dipandang sebagai salah satu jawaban atas kegelisahan terhadap kegersangan nilai kebaikan (*virtue*) dalam perilaku yang akuntabel. Konsep akuntabilitas harus dilandasi oleh nilai yang tidak hanya mengutamakan kepentingan manusia, tetapi juga memperhitungkan dimensi di luar manusia, yaitu kelestarian lingkungan yang telah menjadi budaya masyarakat timur, seperti kearifan pengendalian diri "*mulat sarira*" yang dimiliki masyarakat Bali dalam berinteraksi dengan alam semesta, sehingga dapat mendorong munculnya moral legitimasi yang termanifestasi ke dalam aksi dan tindakan riil yang beretika. Singkatnya, nilai kearifan lokal dapat digunakan sebagai driver untuk mewujudkan perubahan sosial yang beretika dan bermoral (Lehman & Kuruppu, 2017; Toms & Shepherd, 2017).

Gagasan kearifan pengendalian diri "*Mulat sarira*" dapat menjadi dasar dalam menerapkan akuntabilitas yang bersumber pada perilaku etik aktor dalam mengelola lingkungan. *Mulat sarira* merupakan ujung tombak dalam merealisasikan akuntabilitas. Kesadaran *mulat sarira* memotivasi aktor melaksanakan akuntabilitas sebagai bentuk tanggung jawab serta hubungan yang seimbang dan harmonis dengan sesama, lingkungan, dan Tuhan. Hal tersebut menunjukkan bahwa aktor harus memiliki prinsip-prinsip perilaku etika yang tidak hanya mengedepankan kepentingan diri sendiri, yaitu akuntabilitas yang lebih holistik, kompleks, dan keluar dari dominasi ukuran kalkulatif (Gibbon, 2012). Dengan kata lain,

aktor sebagai pihak yang melaksanakan akuntabilitas harus memiliki kesadaran untuk memilah tindakan untuk kebaikan bersama (sesama, alam, dan Tuhan) yang berorientasi *mulat sarira* dalam membangun konsep akuntabilitas. Konsep akuntabilitas yang memiliki aspek *mulat sarira* tersebut akan menghasilkan tindakan aktor yang melaksanakan mekanisme akuntabilitas atas dasar kesadaran diri. Dengan demikian, konsep akuntabilitas ini akan mewujudkan keseimbangan antara organisasi dan masyarakat serta organisasi dengan lingkungan (Kurland, 2017; Nasir, 2012).

Berdasarkan uraian beberapa konsep akuntabilitas di atas, maka kebaruan artikel ini mengisi adanya kekosongan pertanggungjawaban kepada Tuhan dan alam semesta yang tidak dapat dijelaskan oleh beberapa konsep akuntabilitas tersebut. Oleh sebab itu, artikel ini menawarkan konsep akuntabilitas yang digali dari nilai-nilai *mulat sarira* yang mengedepankan hubungan manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia dan manusia dengan alam, atau dalam budaya Bali dikenal dengan *Tri Hita Karana*. Dengan kata lain, konsep akuntabilitas yang ditawarkan pada artikel ini berorientasi pada keseimbangan Tuhan, Alam, dan Manusia sesuai dengan ajaran dan kearifan *Tri Hita Karana*. Konsep akuntabilitas ini digali dari budaya Bali yang secara kontekstual sangat meyakini adanya hubungan yang tidak terpisahkan antara Tuhan, manusia, dan alam. Dengan demikian, akuntabilitas yang menginternalisasi *mulat sarira* memiliki peran yang signifikan dalam mengendalikan perilaku aktor terkait pengelolaan dampak negatif limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) terhadap lingkungan dan masyarakat.

Mulat sarira merupakan budaya Bali yang mengutamakan pengendalian diri dengan cara menilai kembali perbuatan di masa lalu untuk menjaga keseimbangan, keselarasan, dan kedamaian dalam hidup. Nilai-nilai dalam *Mulat sarira* mengingatkan untuk menemukan identitas jati diri dengan kembali ke akar nilai kehidupan. Hal ini bermakna menemukan hakikat diri dan tindakan apa yang akan dilakukan sebagai bentuk komitmen terhadap hakikat diri. Penemuan hakikat diri dilakukan dengan berani introspeksi diri dan memperbaiki tindakan dengan berlandaskan pada nilai dalam kesatuan keseimbangan dan keharmonisan. Hal ini menunjukkan pemikiran dasar *mulat sarira*

mampu membedakan tindakan yang baik dan buruk, serta kesadaran apa pun yang kita perbuat akan memberikan hasil (karma) yang membentuk pola pikir, sikap, dan perilaku. Sementara itu, penelitian tentang akuntansi sosial dan lingkungan, yang fokus pada topik keperilakuan dan kerangka nilai perilaku, masih memiliki ruang yang sangat besar untuk dieksplorasi dan dikembangkan (Parker, 2011). Artinya, tidak ada satu bentuk tunggal dari akuntansi. Akuntansi dapat dibentuk dan dikembangkan dari suatu nilai budaya dengan tujuan mencapai suatu nilai yang menjadi dasar budaya tersebut. Berhubungan dengan hal itu, peneliti menilai bahwa budaya *mulat sarira* yang didasari oleh nilai pengakuan terhadap keseimbangan Tuhan, manusia, dan alam, sangat sesuai untuk menjadi pijakan pengembangan akuntabilitas limbah. Penilaian ini lebih spesifik ditujukan kepada elemen pengendalian diri yang terdapat pada *mulat sarira*, yaitu bahwa interaksi manusia terhadap lingkungan dalam menjalankan usaha tidak boleh melupakan diri. Oleh sebab itu, peneliti tertarik untuk menggunakan nilai-nilai yang terdapat dalam budaya *mulat sarira* dalam membangun konsep akuntabilitas limbah. Berdasarkan uraian di atas, tujuan artikel ini adalah untuk membangun konsep akuntabilitas yang digali dari nilai-nilai *mulat sarira*. Artikel ini membahas beberapa bagian; bagian pertama mengulas tentang konsep akuntabilitas saat ini, bagian kedua membahas tentang nilai-nilai *mulat sarira*, dan bagian ketiga membangun konsep akuntabilitasnya.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif secara induktif terkait akuntabilitas pengelolaan limbah. Pendekatan kualitatif ini berupaya memaknai dan menginterpretasikan fenomena sosial, yaitu akuntabilitas pengelolaan limbah yang dianalisis dalam perspektif nilai filosofis budaya Bali, *mulat sarira*. Penelitian ini menggunakan analisis tanpa aturan baku yang menekankan fleksibilitas melalui reduksi data dan interpretasi. Reduksi data dilakukan berupa menangkap data-data penting dalam mendeskripsikan makna fenomena. Reduksi data dalam penelitian ini adalah mendapatkan makna yang substatif dan signifikan terkait fenomena akuntabilitas pengelolaan limbah. Interpretasi data dalam penelitian ini dilakukan

dengan memaknai data dari hasil reduksi terkait akuntabilitas pengelolaan limbah yang dilandasi dari budaya *mulat sarira*.

Dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi terkait akuntabilitas pengelolaan limbah dan budaya *mulat sarira*. Informan dalam penelitian ini adalah pemilik dan direktur Rumah Sakit Sehati yang berasal dari Bali yang sangat memahami dan mengimplementasikan nilai-nilai *mulat sarira* sebagai pedoman melaksanakan akuntabilitas pengelolaan limbah. Fenomena dalam objek penelitian ini adalah masalah akuntabilitas. Analisis dalam penelitian ini dilakukan melalui perspektif budaya *mulat sarira*.

Dalam meningkatkan keandalan data, penelitian ini menggunakan metode triangulasi. Triangulasi mengonfirmasi data dari beberapa sumber data dalam menguji keabsahan untuk mendapatkan informasi yang utuh (Perone & Tucker, 2003). Data triangulasi yang dikumpulkan dalam penelitian ini bersumber dari hasil wawancara dengan informan yang memiliki kekayaan informasi secara utuh yang menggunakan *mulat sarira* sebagai aktualisasi akuntabilitas pengelolaan limbah, observasi di Rumah Sakit Sehati, dan literatur terkait.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep akuntabilitas. Akuntabilitas merupakan konsep yang abstrak. Para peneliti mendefinisikan akuntabilitas dengan berbagai versi, tetapi substansi itu semua tidak jauh dari konsep tata kelola organisasi yang “baik”. Akuntabilitas tidak hanya mengamati perilaku organisasi sebagai suatu entitas, melainkan juga meliputi pengamatan terhadap perilaku aktor, dalam kapasitasnya sebagai individu, melaksanakan tanggung jawab untuk memenuhi ekspektasi pemangku kepentingan. Konsep akuntabilitas dapat dijelaskan dalam sudut pandang yang sempit dan sudut pandang yang luas (Bovens, 2007). Akuntabilitas dalam sudut pandang yang luas mencakup beberapa kriteria yaitu *transparency, liability, controllability, responsibility, responsiveness*. Kriteria tersebut bersifat evaluatif dan digunakan sebagai pengukuran kinerja akuntabilitas aktor. Kelemahan konsep akuntabilitas yang terlalu luas ini adalah tumpang tindihnya interpretasi konsep tersebut dalam dimensi teknis sehingga penerapan indikator konsep akuntabilitas ini menyebabkan sulitnya

melakukan pengukuran kinerja akuntabilitas seorang aktor. Di samping itu, hingga saat ini belum ada konsensus yang mendefinisikan dan menetapkan perilaku standar seorang aktor yang akuntabel. Oleh sebab itulah, konsep akuntabilitas dalam sudut pandang yang sempit dan bersifat analitis dianggap lebih dapat dipahami. Konsep akuntabilitas dalam pandangan sempit ini menjelaskan potret perilaku aktor dari dimensi sosiologis, yaitu bagaimana perilaku aktor berhubungan dan memberikan laporan kepada pihak lain yang berkepentingan. Dengan kata lain, Bovens (2007) mendefinisikan akuntabilitas sebagai suatu bentuk hubungan sosial antara aktor dan sosial.

Bovens (2007) menjelaskan bahwa akuntabilitas merupakan konsep analitis dan bukan suatu konsep evaluatif. Konsekuensi yang diterima oleh aktor dapat berbentuk konsekuensi formal atau informal. Konsekuensi yang baik atau reputasi yang baik dapat diperoleh oleh organisasi jika melaporkan aktivitas dan kegiatan sesuai dengan ekspektasi pemangku kepentingan. Oleh sebab itu, akuntabilitas melalui penyediaan laporan yang merefleksikan perilaku dan sistem organisasi yang akuntabel disebut sebagai sebuah *magic* (Pollitt & Hupe, 2011). Akuntabilitas diibaratkan sebagai sebuah konsep yang memiliki kesaktian yang dapat membantu organisasi mendapatkan citra positif dan penghargaan dari masyarakat sebagai sebuah *magic*, pencapaian harapan organisasi tersebut dapat diperoleh melalui cara-cara yang baik atau melalui cara yang kurang baik. Itu semua bergantung pada aktor yang mengimplementasikan konsep akuntabilitas tersebut. "Kesaktian" akuntabilitas memungkinkan suatu organisasi memenuhi harapan-harapan masyarakat yang dirasakan sulit dipenuhi oleh organisasi. Akuntabilitas dapat mendorong aktor untuk memiliki hubungan yang baik dengan pemangku kepentingan. Hubungan yang baik akan terwujud jika aktor melaksanakan aktivitas organisasi secara beretika. Namun, tidak jarang aktor juga memanfaatkan akuntabilitas untuk meningkatkan reputasi organisasi. Hal ini dilakukan melalui pemberian laporan yang tidak konsisten dengan teknik dan praktik yang terjadi di lapangan.

Konsep akuntabilitas tidak terlepas dari informasi akuntansi yang dapat memberikan gambaran tentang kegiatan yang dilaksanakan dan pencapaian yang diperoleh oleh organisasi (Patton, 1992). Ber-

kaitan dengan hal tersebut akuntabilitas harus dapat menjawab untuk siapa (*who*) informasi tersebut disiapkan, informasi apa (*what*) yang akan disajikan, dan bagaimana (*how*) informasi tersebut disajikan. Informasi akuntansi tidak dibatasi pada informasi keuangan saja, tetapi juga informasi deskriptif. Informasi deskriptif bertujuan merefleksikan perilaku aktor, hal yang menjadi latar belakang munculnya perilaku tersebut, dan akibat (baik berupa kerusakan maupun manfaat) yang menjadi konsekuensi perilaku tersebut. Dengan adanya informasi deskriptif tersebut, informasi akuntansi perlu menegakkan moralitas, kebaikan, dan kebermanfaatannya bagi kehidupan. Hal ini senada dengan kritikan Ossege (2012) bahwa akuntansi tidak hanya bermanfaat untuk mendorong efisiensi, melainkan juga bermanfaat untuk merefleksikan bagaimana suatu nilai budaya menjadi landasan dalam membentuk perilaku dan praktik akuntansi.

Konsep akuntabilitas hingga kini tidak dapat didefinisikan dengan jelas (Bovens, 2010; Rismawati, 2015) sehingga pada akhirnya menimbulkan kerancuan aktor dalam memahami substansi konsep akuntabilitas. Kerancuan dalam memahami akuntabilitas ini berdampak pada ketidak konsistenan yang terjadi pada tataran praktik akuntabilitas. Bahkan, Bovens (2010) menyebutkan bahwa istilah akuntabilitas sering digunakan secara bergantian dengan istilah lainnya yang memiliki makna berdekatan:

"Accountability" is used as a synonym for many loosely defined political desiderata, such as good governance, transparency, equity, democracy, efficiency, responsiveness, responsibility and integrity" (Bovens, 2010).

Di permukaannya akuntabilitas tidak lebih dari sekadar praktik administratif untuk memperoleh legitimasi. Sebagai konsekuensinya mekanisme akuntabilitas tidak dapat sepenuhnya memperbaiki perilaku aktor menjadi lebih akuntabel (Ossege, 2012). Tidak mengherankan jika pada akhirnya krisis akuntabilitas menjadi fenomena yang banyak ditemui saat ini. Bahkan, krisis akuntabilitas ini telah menjadi skandal penyelewengan yang dilakukan aktor tidak hanya pada organisasi korporasi, tetapi juga sampai pada organisasi nirlaba (Ebrahim, 2003).

Konsep akuntabilitas dapat dipahami secara luas dan secara sempit (Bovens,

2010). Akuntabilitas dalam perspektif yang luas merupakan itikad aktor untuk berperilaku baik. Perilaku yang baik dalam konteks ini merupakan kinerja aktual seorang aktor dalam bertindak dan mengambil keputusan sehingga konsep akuntabilitas secara luas berkaitan erat dengan etika. Terkait dengan perilaku yang baik hingga saat ini tidak ada standar baku tentang bagaimana dan seperti apa perilaku yang baik tersebut dimaksudkan. Konsekuensinya, tidak mudah untuk mendefinisikan akuntabilitas dalam suatu organisasi karena akuntabilitas dalam konteks perilaku yang baik dapat berbeda pada setiap organisasi dan institusi (Bovens, 2010:950). Dengan demikian keberadaan suatu standar dan kode etik memiliki peran penting sebagai rambu-rambu untuk mengevaluasi tindakan aktor pada setiap organisasi dan institusi. Gap yang terjadi antara perilaku aktor dan kode etik yang telah ditetapkan dikenal sebagai *accountability deficit* (Bovens, 2010).

Selanjutnya, akuntabilitas dalam perspektif yang sempit merupakan suatu bentuk hubungan sosial antara aktor dan masyarakat (Bovens, 2010:948). Hubungan yang baik antara aktor dan masyarakat dibangun dari komunikasi yang baik antara kedua pihak. Dalam konteks ini penyajian informasi akuntansi merupakan salah satu mekanisme untuk menjaga komunikasi yang baik. Namun, pada umumnya informasi yang disajikan kepada masyarakat dilatarbelakangi oleh motif untuk memperoleh legitimasi yang bertujuan menjaga going concern suatu organisasi (Thomas & Lamm, 2012). Oleh karena itu, dapat terjadi mekanisme akuntabilitas belum dapat memenuhi ekspektasi masyarakat. Gap antara mekanisme akuntabilitas dan ekspektasi masyarakat dikenal sebagai *control deficit* (Bovens, 2010). Misalnya, kasus dalam konteks artikel ini bahwa pengelolaan limbah B3 yang bertujuan untuk meminimalkan dampak negatif terhadap masyarakat dan lingkungan merupakan suatu bentuk mekanisme akuntabilitas institusi kepada masyarakat. *Control deficit* terjadi pada saat ekspektasi masyarakat akan lingkungan yang bersih tidak sesuai dengan informasi yang disajikan, atau bahkan informasi yang disajikan tidak memuat substansi pengelolaan limbah medis yang signifikan. Mengapa gap ini dapat terjadi? Menurut Bovens (2010) *control deficit* terjadi karena terdapat ketidaksesuaian antara perilaku aktor dan standar kode etik

(standar pengelolaan limbah medis). Dengan kata lain, *control deficit* tidak dapat dipisahkan dari *accountability deficit*. Selanjutnya, substansi *accountability deficit* adalah perilaku aktor. Artinya, perilaku aktor merupakan kunci untuk merealisasikan lingkungan yang bersih dan masyarakat yang sehat dari kegiatan operasional organisasi.

Dari uraian di atas dapat dipahami beberapa poin utama yaitu bahwa konsep akuntabilitas yang didiskusikan selama ini dalam berbagai literatur masih berorientasi pada hubungan manusia dan manusia. Oleh karena itu para peneliti akuntabilitas masih memperdebatkan ketidaksesuaian antara konsep akuntabilitas yang mereka bangun dengan praktik akuntabilitas yang terjadi dalam kehidupan nyata. Konsep akuntabilitas yang dibangun belum sepenuhnya dapat memperbaiki perilaku aktor meskipun konsep akuntabilitas merupakan hal yang berkaitan dengan etika dan diimplementasikan melalui serangkaian kode etik. Dalam hal ini artikel ini melihat adanya suatu kekosongan dalam beberapa konsep akuntabilitas yang dibangun oleh beberapa literatur di atas. Untuk mengisi kekosongan tersebut, konsep akuntabilitas seharusnya tidak hanya berorientasi pada pertanggungjawaban manusia kepada manusia lain, tetapi harus mengikutsertakan pertanggungjawaban manusia dengan Tuhan, dan pertanggungjawaban manusia dengan alam. Prinsip pertanggungjawaban kepada unsur non manusia tersebut dapat diperoleh dari kearifan budaya timur, misalnya kearifan budaya Bali yang dilandasi oleh ajaran *Tri Hita Karana*.

Budaya penggerak karakter. Budaya menunjukkan identitas diri suatu kelompok masyarakat yang terkandung nilai dengan kearifan lokalnya. Budaya berkearifan lokal masih melekat dalam masyarakat Bali karena masyarakatnya masih berciri kolektif, komunal dan keagamaan. Budaya yang berkearifan lokal sebagai pembentuk karakter dapat menangkal hilangnya orientasi (disorientasi) dan dislokasi. Di sisi lain, budaya modern juga dapat mempengaruhi pergeseran perilaku masyarakat menjadi bersifat konsumisme, materialisme, dan individualisme. Dengan demikian, masyarakat perlu diberi penguatan dan pewarisan nilai-nilai kearifan lokal dalam menghadapi masuknya budaya baik dalam bentuk *surface structure* (sikap dan pola-pola perilaku) maupun *deep structure* (sistem nilai, pandangan hidup, filsafat, dan keyakinan) (Suwardani, 2015: 247). Hal

ini dikarenakan nilai-nilai globalisasi modern tidak selalu membawa nilai kebaikan bagi perkembangan kualitas hidup (Suwardani, 2015: 249). Untuk mengantisipasi terkikisnya budaya berkearifan lokal, perlu ada kesadaran bersama untuk meng-*ajeg*-kannya.

Kesadaran *mulat sarira* menjadi pondasi dalam meng-*ajeg*-kan budaya Bali. Kesadaran *ajeg* budaya ini akan membangun konstruksi dalam menjaga budaya Bali dengan kearifan lokalnya untuk tetap eksis memberikan kontribusi nilai lebih pada aktivitas masyarakat. *Mulat sarira* merupakan budaya Bali yang bermakna pemahaman diri dan introspeksi untuk melakukan pengendalian diri. Pengendalian diri dilakukan terhadap musuh yang ada dalam diri, apa yang telah dilakukan, dan apa yang seharusnya dilakukan.

Nilai-nilai mulat sarira. *Mulat sarira* merupakan suatu nilai kesadaran diri dalam bertindak dan bertingkah laku. Nilai kesadaran diri dalam hal ini dapat menjadi pijakan dalam meningkatkan kesadaran pelaku bisnis pelayanan kesehatan terkait pengelolaan limbah medis. *Mulat sarira* mengingatkan manusia untuk menemukan identitas jati diri dengan kembali ke akar nilai kehidupan. Hal ini bermakna menemukan hakikat diri dan menentukan tindakan apa yang seharusnya dilakukan sebagai bentuk komitmen perbaikan diri. *Mulat sarira* dilakukan dengan berani introspeksi diri dan memperbaiki tindakan dengan berlandaskan pada keseimbangan dan keharmonisan hidup. Hal ini menunjukkan bahwa pemikiran dasar *mulat sarira* mampu membedakan tindakan yang baik dan buruk, serta sadar bahwa apa pun yang kita perbuat akan memberikan hasil (*karmaphala*). *Mulat sarira* menitikberatkan pelestarian kebudayaan yang memiliki nilai keseimbangan dan keharmonisan hidup yang mampu bertindak bijak. Jargon meng-*ajeg*-kan Bali telah menstimuli semangat menjaga budaya bernilai keseimbangan dan keharmonisan dari upaya pengikisan budaya baik dari pihak internal maupun eksternal. Jadi jargon *mulat sarira* mengingatkan masyarakat untuk sadar hidup yang seimbang dan harmonis baik dengan Tuhan, diri sendiri, sesama makhluk hidup, maupun lingkungan.

Mulat sarira merupakan benteng diri dalam menghadapi godaan materi yang tidak memperhatikan keseimbangan dan keharmonisan hidup. Hal ini menunjukkan budaya *mulat sarira* merupakan “aset kesada-

ran dan komitmen diri” dalam membangun konsep akuntabilitas pengelolaan limbah. Dengan demikian, *mulat sarira* mengalirkan semangat menegakkan nilai ketertiban hidup dengan “menjaga” tindakan, introspeksi, dan berani memperbaiki tindakan, mampu bertindak adil dan bijaksana dalam meng-*ajeg*-kan budaya bernilai keseimbangan dan keharmonisan hidup. Dengan demikian, *mulat sarira* menjadi alat kontrol diri dari kesewenangan memperlakukan sesama dan lingkungan dengan tidak ramah, keserakahan, serta kebebasan bertindak tanpa batas kepekaan sosial. *Mulat sarira* yang berawal dari refleksi diri menjadi langkah awal menuju keseimbangan dan keharmonisan hidup. Tindakan yang ramah dan memiliki kepekaan sosial harus berada dalam batas keseimbangan dan keharmonisan yang mampu membangun ketentraman dan kesejahteraan. Dengan adanya kesadaran *mulat sarira*, seseorang akan menjauhkan diri dari tindakan tidak terpuji termasuk dalam akuntabilitas pengelolaan limbah.

Konsep akuntabilitas berdasarkan nilai mulat sarira. Akuntabilitas pengelolaan limbah berbasis *mulat sarira* memiliki kandungan nilai yaitu berani introspeksi diri dan perbaikan secara berkelanjutan, *ajeg* dalam kesadaran dan komitmen keharmonisan dan keseimbangan, budaya malu, karya yang berasal dari kekuatan spiritual, bijak beradaptasi, bijak memilah tindakan yang baik dan buruk, membantu dengan tulus, apa pun yang diperbuat akan mendatangkan hasil, dan saling menghargai. *Mulat sarira* menjadi bentuk pertanggungjawaban dan pengendalian diri dalam melaksanakan akuntabilitas pengelolaan limbah. Berani introspeksi diri dan perbaikan secara berkelanjutan (*puputan*). *Puputan* mencerminkan tradisi budaya masyarakat Bali berupa tindakan perlawanan habis-habisan demi menjaga kehormatan, berani, rela berkorban demi tanah air, menegakkan kebenaran, dan pantang menyerah. Menurut budaya Bali dalam melakukan pekerjaan seseorang harus berani introspeksi diri. Hal ini bertujuan agar kualitas pekerjaan tidak berkurang. Introspeksi diri berarti berani melihat ke dalam diri, menyadari kekurangan dan kealpaan diri, dan bertekad untuk memperbaikinya. Tujuan introspeksi diri adalah untuk menjaga kehormatan diri. Begitu juga dalam bisnis rumah sakit yang menjual produk utama dalam bentuk jasa dan pelayanan kesehatan. Kualitas jasa yang diberikan dapat dira-

sakan berbeda oleh setiap konsumen. Oleh sebab itu, pihak rumah sakit harus melakukan introspeksi diri dan berbenah diri agar eksistensi mereka dapat dipertahankan. Berikut kutipan pernyataan manajer SDM.

“...dalam memberikan pelayanan di Rumah Sakit Sehati ini, saya menanamkan pada SDM untuk berupaya melakukan introspeksi dan perbaikan kinerja karena itu bentuk menempatkan pasien dan masyarakat sebagai informan pemberi masukan dan kritik yang membangun”.

Introspeksi diri tidak hanya dilakukan dengan menerima berbagai masukan dan kritikan dari pasien, tetapi juga dari masyarakat. Fakta bahwa setiap kegiatan usaha memiliki limbah, dan limbah yang tidak dikelola dengan baik akan menghasilkan dampak lingkungan. Oleh sebab itu, masyarakat yang bermukim di sekitar rumah sakit juga memiliki hak untuk tidak tercemar limbah medis rumah sakit. Pihak rumah sakit tidak dapat mengabaikan keberadaan mereka dan begitu juga halnya dengan dampak limbah rumah sakit terhadap kehidupan mereka. Berkaitan dengan hal ini, pihak rumah sakit menyadari bahwa merupakan tanggung jawab mereka untuk mengelola limbah dan mengendalikan dampaknya agar tidak merusak lingkungan dan mengganggu masyarakat. Pihak rumah sakit memahami bahwa limbah rumah sakit termasuk dalam limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) sehingga harus dimusnahkan melalui prosedur yang telah ditentukan dan dilakukan oleh pihak yang profesional. Kesadaran ini merupakan komitmen rumah sakit untuk menjaga keseimbangan dan keharmonisan hubungan antara manusia, alam, dan Tuhan. Dalam budaya Bali kesadaran ini dikenal dengan istilah *Ajeg*, yaitu kesadaran dan komitmen seseorang dalam menjaga keharmonisan dan keseimbangan berbasis pada ajaran THK. Ke-*ajeg*-an pihak rumah sakit terlihat dari kesediaan mereka untuk melibatkan pihak *outsourcing* dalam mengelola limbah rumah sakit. Kesadaran dan komitmen ini terbentuk tidak hanya karena adanya peraturan pemerintah yang mengatur tata cara pengelolaan dan pemusnahan limbah, tetapi juga karena pihak rumah sakit meyakini bahwa ajaran THK yang mereka alami selama ini mengajarkan bahwa memelihara keseimbangan

hubungan manusia dan alam berhubungan dengan keharmonisan hubungan manusia dan Tuhan. Dengan kata lain, memelihara hubungan dengan alam dan lingkungan sama pentingnya dengan memelihara hubungan dengan Tuhan. Seperti pernyataan manajer bagian Keuangan berikut ini.

“...kami telah bekerja sama dengan pihak *outsourcing* spesialis pengelola limbah rumah sakit dalam menangani pengelolaan limbah rumah sakit, yang terbaik bila ada kesadaran diri bahwa bila kami menjaga kebersihan dengan mengelola limbah rumah sakit dengan tepat maka akan tetap menjaga kepercayaan dan hubungan baik dengan masyarakat sekitar dan melestarikan kesehatan lingkungan”.

Ajeg merupakan nilai yang terdapat dalam budaya Bali yang berlandaskan pada ajaran THK. Nilai *Ajeg* merupakan bentuk cinta pada Tuhan dengan menjaga keharmonisan dan keseimbangan hubungan dengan sesama, hubungan dengan makhluk lain dan lingkungan, serta hubungan dengan Tuhan. Hubungan ini tidak terpisahkan dalam kehidupan. Apabila ada kesadaran dan komitmen untuk mewujudkan keseimbangan dan keharmonisan, manusia akan menghindari tindakan yang tidak bermanfaat yang berdampak pada hidup yang damai, seimbang, dan sejahtera. THK mengingatkan kita untuk tidak merugikan sesama dan lingkungan, serta cinta dan bakti pada Tuhan. Kesadaran THK akan dapat menekan materialisme, egoisme, konsumerisme, dan individualisme. Penerapan THK juga akan membentuk manusia yang berbakti pada Tuhan, cinta makhluk hidup lain-lingkungan, dan cinta sesama.

Bagi pihak rumah sakit bukan hal yang mudah untuk melakukan kerja sama dengan pihak *outsourcing* yang profesional dalam menangani pengelolaan limbah. Masalah biaya adalah yang paling utama karena pihak *outsourcing* yang diajak bekerja sama adalah pihak yang telah memiliki izin dari pemerintah dan telah terakreditasi dalam pengelolaan dan pemusnahan limbah. Dengan adanya kesadaran dari ajaran THK, masalah biaya yang dirasa cukup memberatkan perusahaan akan berkurang. Hal ini karena keyakinan bahwa menjaga keseimbangan alam, yaitu lingkungan, dan keharmonisan dengan sesama, yaitu hubungan dengan

masyarakat sekitar dan regulator lingkungan, merupakan wujud bakti kepada Tuhan.

Berdasarkan hal tersebut maka bentuk menjaga hubungan yang harmonis dan seimbang dengan sesama dalam implementasi akuntabilitas pengelolaan limbah yaitu dengan saling asah-asih-asuh, peduli dengan sesama, menjalin kerja sama yang baik, memberikan manfaat bagi sesama, menjaga hubungan yang harmonis dengan sesama, membantu sesama yang membutuhkan, menyerukan kesadaran pengelolaan limbah, menjaga kesehatan; serta melaporkan pengelolaan limbah baik atas dasar kesadaran maupun aturan. Bentuk menjaga hubungan yang harmonis dan seimbang dengan makhluk hidup lain dan lingkungan dalam implementasi akuntabilitas pengelolaan limbah yaitu dengan memelihara dan tidak merusak ekosistem hewan, tumbuhan, dan lingkungan; menjaga kebersihan dan keindahan; menjaga kelestarian hewan dan lingkungan; menjaga keseimbangan alam; perusahaan menyiapkan pelaporan pengelolaan limbah baik atas dasar kesadaran maupun aturan. Sementara itu, bentuk menjaga hubungan yang harmonis dan seimbang dengan Tuhan dalam implementasi akuntabilitas pengelolaan limbah yaitu dengan melaksanakan perintah-Nya dalam pengelolaan limbah, berbakti/beribadah, introspeksi diri dan melakukan perbaikan berkelanjutan, meditasi (melatih konsentrasi dan pengendalian diri), serta mengunjungi tempat-tempat suci.

Menjaga hubungan dengan sesama manusia, lingkungan dan Tuhan tidak terlepas dari Budaya *Jengah*, yaitu memiliki rasa malu dan semangat menghasilkan karya dan tindakan terbaik. *Jengah* merupakan semangat yang menumbuhkan inovasi dan bangkit dari keterpurukan serta memiliki sifat-sifat dinamik yang menjadi pangkal segala perubahan dalam kehidupan masyarakat. Setelah adanya komitmen untuk menjaga kepatuhan kepada Tuhan dan keharmonisan hubungan dengan alam dan manusia, budaya selanjutnya adalah *jengah*. Dalam konteks akuntabilitas budaya *jengah* dapat dikatakan sebagai rasa malu kegagalan terhadap tidak tercapainya komitmen dalam menjaga keseimbangan dan keharmonisan hubungan dengan sesama ciptaan Tuhan. Oleh sebab itu, pihak rumah sakit berupaya bersikap transparan dalam menunjukkan kepada publik pembuktian-pembuktian komitmen mereka dalam mengelola dampak lingkungan. Bagi pihak rumah sakit sikap

transparan merupakan upaya untuk menghindari kebohongan. Kebohongan dalam hal ini merupakan ketidaksesuaian antara informasi pengelolaan dampak lingkungan dan kegiatan aktual dalam mengelola dampak lingkungan. Ke-*jengah*-an terhadap kegagalan pencapaian komitmen pengelolaan dampak lingkungan, seperti yang dikutip dari pernyataan manajer utama berikut ini.

“...kami memiliki ke-*jengah*-an bila melakukan kebohongan dalam pengelolaan limbah rumah sakit dan tidak dapat memberikan pelayanan yang terbaik karena kami harus berikan contoh hidup yang sehat”.

Hal lain yang dapat mendukung tercapainya komitmen organisasi adalah rutinitas mengenai kecerdasan dan keyakinan spiritual yang ditujukan untuk membentuk kekuatan pikiran dan kesadaran pribadi secara mendalam tentang keberadaan hubungan pelayanan kepada masyarakat dan bakti kepada Tuhan. Rutinitas ini dikenal dengan nilai *taksu*. Nilai *taksu* terlihat dari rutinitas spiritual yang dilakukan oleh segenap staf dan manajemen. Rutinitas spiritual tersebut terlihat dari keberadaan tempat khusus yang disediakan untuk melaksanakan ritual sembahyang. Menurut penjelasan manajemen pelaksanaan rutinitas tersebut sengaja dijadikan sebagai suatu budaya organisasi. Hal ini bertujuan agar para staf dan karyawan memahami bahwa pekerjaan mereka bukan hanya untuk membantu sesama manusia, melainkan juga sebagai pelayanan kepada Tuhan. Manajemen meyakini bahwa pekerjaan yang diawali dari restu, tuntunan, dan lindungan Tuhan akan jauh dari hal-hal yang merugikan masyarakat dan lingkungan. Oleh karena itu, kekuatan spiritual dan internal yang ada dalam diri individu merupakan pendorong (*driver*) yang dapat mengarahkan organisasi agar selalu memberikan pelayanan terbaik. Kekuatan ini terdapat dalam diri setiap individu staf dan manajemen organisasi. Pihak manajemen meyakini bahwa SDM yang kuat menjadikan organisasi yang kuat. Menurut manajemen nilai *taksu* juga akan menuntun perusahaan untuk melaksanakan pengelolaan limbah dengan baik. Manajemen yang meyakini bahwa pekerjaan mereka adalah bentuk pelayanan kepada Tuhan akan merasa tidak nyaman dengan dampak limbah medis yang tidak ditangani dengan tepat. Dampak limbah

medis yang mencemari lingkungan dapat terlihat dalam jangka pendek dan jangka panjang. Oleh karena itu, hal-hal yang bersifat merusak, baik hubungan manusia dengan manusia maupun hubungan manusia dengan lingkungan, bukan perilaku yang direstui dan dituntun oleh Tuhan. Pengelolaan limbah membutuhkan komitmen yang kuat dari organisasi sehingga sangat membutuhkan kesadaran spiritual untuk menjaga dan memupuk kesadaran atas komitmen tersebut. Sementara itu, nilai *Taksu* dalam budaya Bali merupakan kekuatan internal yang mampu membentuk kecerdasan dan kreativitas, kekuatan spiritual dalam menghasilkan karya dalam melaksanakan peran dan fungsi. Nilai ini didasarkan pada kutipan hasil wawancara dengan manajer SDM:

“...kami memiliki seruan dan prosedur kerja bagi semua SDM untuk memulai kerja didahului dengan sembahyang agar bekerja dalam restu, tuntunan, dan lindungan Ida Sang Hyang Widhi karena itu merupakan kekuatan spritual yang mendorong pelayanan yang terbaik”.

Komitmen dan kekuatan keyakinan dalam diri saja tidak cukup. Manajemen juga menyadari bahwa untuk menjadi rumah sakit yang ramah lingkungan membutuhkan proses pembelajaran secara terus menerus. Bagi pihak rumah sakit bukan hal yang mudah untuk serta merta mematuhi regulasi lingkungan yang dirasakan banyak membatasi ruang gerak mereka. Seringkali pihak rumah sakit dihadapkan pada dilema antara mengedepankan kepentingan untuk memaksimalkan keuntungan dan kepentingan pada kepedulian terhadap dampak lingkungan. Pada titik ini manajemen rumah sakit menyusun prioritas tujuan mereka. Pihak rumah sakit menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan eksternal serta berupaya menyelaraskan tujuan ekonomi dan tujuan kebersihan lingkungan. Untuk mencapai hal tersebut, pihak rumah sakit beberapa kali mengikuti pelatihan terkait mekanisme pengelolaan limbah medis dan berkonsultasi dengan pihak-pihak profesional yang memahami ruang lingkup pengelolaan limbah rumah sakit. Hal ini memperlihatkan komitmen rumah sakit untuk menjaga dan memelihara lingkungan dari dampak limbah medis mereka, meskipun hal tersebut masih dikategorikan belum sepenuhnya sempurna.

Tidak hanya memperlihatkan komitmen terhadap konservasi lingkungan, perilaku manajemen rumah sakit tersebut juga memperlihatkan terbukanya pikiran untuk menerima kecenderungan perubahan sosial yang menginginkan lingkungan bersih dan bebas limbah. Pikiran yang terbuka kemudian mendorong rasa ingin belajar terus menerus. Seperti yang dijelaskan oleh informan bahwa pihak rumah sakit telah melakukan kerja sama dengan pihak ketiga yang profesional di bidang pengelolaan limbah medis. Kerja sama ini juga memberikan keuntungan dalam bentuk konsultasi yang intensif kepada pihak rumah sakit. Dalam budaya Bali nilai ini dikenal dengan *Desa Kala Patra* yang bermakna bijak beradaptasi, fleksibel, dinamis, belajar berkelanjutan, dan selektif. Nilai ini didasarkan pada kutipan hasil wawancara dengan manajer utama.

“...kami tidak kaku, kami berkomitmen, terus belajar, dan menerima masukan informasi yang bersifat membangun untuk perbaikan kinerja pelayanan kami”.

Kesadaran untuk terus berbenah diri dan menjalani proses pembelajaran organisasi tidak mudah. Tantangan besar dari internal yang harus dikelola dengan bijaksana oleh manajemen adalah perbedaan pola pikir individu dalam organisasi. Pihak manajemen menyadari bahwa dalam diri setiap individu, staf, dan karyawan rumah sakit, terdapat sifat baik dan buruk dalam hati yang saling bertolak belakang. Namun, sifat buruk tidak selamanya buruk karena sifat buruk yang dikelola dengan baik dan selalu diintrospeksi akan semakin memperkuat sifat baik dalam diri. Seperti yang dicontohkan oleh pihak manajemen ketika rumah sakit mendapat teguran dari badan lingkungan hidup terkait sistem pengelolaan limbah cair medis. Pada awalnya pihak manajemen merasa malu dan tidak nyaman dengan teguran tersebut. Kemudian permasalahan tersebut dibahas pada rapat manajemen dan pihak manajemen menyadari bahwa mereka harus mengeluarkan biaya tambahan untuk mengatasi permasalahan limbah tersebut. Namun, mereka meyakini bahwa untuk mencapai pengelolaan limbah yang tepat dan sempurna, dibutuhkan suatu proses pembelajaran organisasi. Oleh sebab itu, mereka harus memutuskan secara bijaksana hal yang menjadi prioritas organisasi untuk saat itu. Dengan kata lain, permintaan regula-

tor mengenai perbaikan sistem pengelolaan limbah cair medis tetap dijalankan, tetapi dilaksanakan sesuai dengan kapasitas dan kemampuan organisasi pada saat itu. Perilaku manajemen ini memperlihatkan bahwa sifat buruk dalam hati, yaitu merasa malu dan tidak nyaman terhadap teguran pemerintah, dikelola dengan baik oleh organisasi. Jika rasa malu tidak muncul, organisasi tidak akan membahas isu perbaikan sistem pengelolaan limbah tersebut dalam rapat manajemen. Tanpa adanya diskusi dan kebijakan bersama mengenai kebutuhan terhadap teknologi pengelolaan limbah, organisasi akan dihadapkan pada salah satu dari dua pilihan yaitu mengeluarkan biaya yang sangat besar untuk investasi teknologi tersebut atau sama sekali tidak menghiraukan imbauan regulator yang berakibat pada sanksi pemerintah pada jangka panjang.

Namun, rasa malu dan tidak nyaman tersebut dikelola dengan bijaksana sehingga menghasilkan keputusan penyesuaian kepentingan lingkungan, yaitu investasi sistem pengelolaan limbah cair medis yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan organisasi, dan kepentingan organisasi yang mengutamakan efisiensi biaya. Pengelolaan sifat buruk dalam diri tersebut merupakan keinginan dari sifat baik yang ada dalam diri manajemen demi terwujudnya lingkungan bersih. Oleh karena itu, keputusan yang dihasilkan pada akhirnya adalah berupaya menyeimbangkan dan menelaraskan tujuan untuk mencapai lingkungan yang bersih tanpa mengorbankan tujuan utama organisasi untuk mencapai kesejahteraan. Nilai ini oleh masyarakat Bali disebut dengan budaya *Saput poleng*, yaitu merupakan ornamen lambang sifat yang bertolak belakang yaitu suka-duka, baik dan buruk. Dengan kondisi tersebut manusia harus bijak menyikapi hidup misalnya dengan tidak berlebihan dalam menghadapi suka dan duka. Hal ini menitikberatkan pada kebijaksanaan dalam memilih mana yang baik dan buruk. Nilai ini didasarkan pada kutipan hasil wawancara dengan manajer utama.

“Apabila kami mendapatkan pujian atau kritikan dari pihak lain... pasien...keluarganya, kami sikapi dengan bijak untuk perbaikan”.

Sifat baik dan buruk yang dikelola dengan baik juga berdampak pada proses internal organisasi. Pelayanan menyeluruh pada pasien ditangani oleh beberapa divisi yang

ada dirumah sakit. Benturan kepentingan antardivisi sangat berpotensi terjadi. Hal ini dapat terjadi karena setiap divisi mempunyai target capaian dan indikator kinerja yang berbeda. Setiap divisi harus fokus pada indikator kinerja masing-masing dan kemudian membentuk kecenderungan mengabaikan kepentingan bersama. Namun, manajemen dengan tegas menekankan pentingnya menyelesaikan permasalahan dengan hati yang terbuka dan tulus. Staf dan karyawan tidak hanya dinilai dari kinerja individu dan kinerja divisi, melainkan juga dari kinerja capaian organisasi secara keseluruhan. Staf dan karyawan memahami bahwa profesi mereka sebagai tenaga medis merupakan tugas mulia, menuntut perhatian yang besar, rasa kasih sayang dan jiwa sosial yang tinggi pada pasien. Hal ini sejalan dengan tujuan organisasi yang ingin memberikan pelayanan terbaik pada pasien. Dengan kata lain, karyawan tetap melaksanakan tugas utama masing-masing tetapi tanpa mengabaikan kepentingan bersama. Nilai ini dikenal dengan istilah *Ngayah*, yang berarti kewajiban sosial yang dilaksanakan saling membantu dengan hati yang tulus. Nilai diperoleh dari kutipan wawancara dengan manajer SDM sebagai berikut.

“...di sini banyak divisi...itu harus menjadi satu kesatuan. Kami harus saling menjaga kerja sama. Nah... itulah yang mampu memberikan kepuasan ke pasien... dari kerja sama itu, hasil dari itu”

Hukum *karma* merupakan hukum sebab akibat di mana dari apa pun yang diperbuat yang akan mendatangkan hasil jika berbuat baik akan menghasilkan *karmaphala* yang baik, begitupun sebaliknya. Akuntabilitas terhadap pengelolaan limbah dapat dilakukan dengan berbagai cara. Namun, kebijakan dalam memilih cara yang tepat dan sesuai merupakan hal yang penting bagi organisasi. Cara yang dilakukan dengan menyajikan pelaporan yang baik, tetapi tidak sesuai dengan kenyataan sehari-hari, merupakan suatu tindakan membohongi masyarakat. Menurut keyakinan masyarakat Bali tentang *karmaphala*, cara yang tidak baik juga akan memberikan hasil yang tidak baik di kemudian hari. Sebagaimana diketahui bahwa pemerintah telah menyediakan perangkat hukum tentang mekanisme pengelolaan limbah yang tepat. Di samping itu, bagi rumah sakit patuh

pada mekanisme pemerintah tersebut akan menimbulkan biaya tambahan. Mekanisme pengelolaan limbah yang baik membutuhkan tenaga ahli dan teknologi yang telah tersertifikasi. Biaya tambahan yang muncul tersebut pada dasarnya bertolak belakang dengan prinsip efisiensi yang dimiliki oleh sektor bisnis di rumah sakit. Oleh sebab itu, usaha rumah sakit sangat berpotensi untuk memilih cara yang tidak baik dalam melakukan mekanisme pengelolaan limbah. Dengan adanya budaya bahwa segala sesuatu memiliki *karmaphala*, maka informan memiliki kecenderungan untuk melaksanakan pengelolaan limbah rumah sakit sebagaimana mekanisme yang telah ditetapkan oleh regulator. Nilai ini didasarkan pada kutipan hasil wawancara dengan manajer utama.

“Kami menghindari pembohongan publik ataupun pelayanan yang buruk karena akan berimbas negatif pada kami, namun bila kami memberikan pelayanan terbaik tanpa merugikan pihak mana pun maka kami meyakini bahwa kami akan mendapatkan kepercayaan masyarakat dan berkah dari Ida Sang Hyang Widhi Waca”.

Dalam hukum *karmaphala*, tidak ada satu pun perbuatan kita yang luput dari penglihatan Tuhan. Berdasarkan hukum *karmaphala* akuntabilitas pengelolaan limbah perlu diterapkan dengan sebaiknya untuk menghasilkan *karmaphala* baik dunia maupun akhirat.

Pencapaian tujuan organisasi dapat diwujudkan dengan kerja sama antardivisi, dan dukungan seluruh staf dan manajemen. Oleh sebab itu, selain menjaga persatuan antarindividu, dalam organisasi juga diperlukan sikap saling menghargai. Sikap ini terdengar sederhana, tetapi implementasinya memiliki dampak yang luar biasa dalam menjaga persatuan dan kesatuan visi organisasi. Pihak manajemen mengakui bahwa komposisi staf dan manajemen tidak pernah sama.

Perbedaan usia, perbedaan latar belakang pendidikan, perbedaan gender, perbedaan keahlian serta pengalaman kerja merupakan hal yang niscaya dalam organisasi. Oleh sebab itu, manajemen memahami bahwa cara yang paling efektif untuk menyatukan perbedaan itu adalah dengan memupuk perilaku saling menghargai. Nilai saling menghargai dalam tradisi masyarakat Bali dikenal dengan *Paras paros*. Penerapan

nilai ini pada organisasi terlihat dari kutipan hasil wawancara dengan manajer SDM:

“...untuk terjalin kerja sama yang baik, kami tanamkan sikap saling menghargai. Dalam organisasi... saling menghargai ini penting. Cara menilainya dengan evaluasi...tapi lebih dominan dari input pihak luar. Kompak atau tidaknya kita itu terlihat dari luar. Jadi selain evaluasi bulanan, tindak lanjut terhadap masukan yang bersifat membangun dari pasien dan keluarganya, SDM internal, dan pihak yang berkepentingan lainnya juga ada...”

Akuntansi dan pengelolaan limbah.

Pengelolaan limbah rumah sakit secara hukum telah diatur oleh pemerintah tentang bagaimana suatu rumah sakit harus melaksanakan kegiatan pengelolaan limbah yang baik. Seperti yang diatur dalam Kepmenkes RI No. 1204/Menkes/SK/2004 (tentang persyaratan kesehatan lingkungan rumah sakit) bahwa setiap rumah sakit harus melaksanakan pengelolaan limbah medis tersertifikasi melalui proses pengumpulan, pengangkutan, dan pemusnahan. Tujuan sertifikasi pengelolaan ini tidak lain adalah untuk menjamin bahwa pihak rumah sakit telah melaksanakan prosedur pengelolaan limbah medis dengan benar. Di samping itu, perangkat sertifikasi juga dapat menjadi *tools* yang bermanfaat bagi rumah sakit dalam mengimplementasikan mekanisme pengelolaan limbah yang berkualitas (Lozano, 2012). Dengan kata lain, regulator telah mengatur standar mekanisme pengelolaan limbah yang harus dilaksanakan oleh rumah sakit dan pelayanan kesehatan. Namun, faktanya masih banyak rumah sakit yang belum melaksanakan prosedur pengelolaan limbah dengan benar dan sesuai standar, meskipun mereka tetap secara rutin menyiapkan laporan pengelolaan limbah kepada pemerintah (Tsakona, Anagnostopoulou, & Gidaracos, 2007).

Kesenjangan dan ketidaksesuaian antara pelaksanaan pengelolaan limbah secara riil dengan laporan pengelolaan limbah yang disiapkan, memperlihatkan bahwa interaksi rumah sakit dan pemerintah terhadap pengelolaan limbah bersifat simbolik (Rodrigue, 2014). Penelitian terkait pengelolaan limbah rumah sakit menjelaskan bahwa pengelolaan limbah membutuhkan biaya yang be-

sar, infrastruktur yang baik dan tenaga profesional yang cukup, dan hal tersebut belum sepenuhnya tersedia di negara berkembang (Chaerul, Tanaka, & Shekdar, 2008). Dengan kata lain, tidak mudah untuk melaksanakan pengelolaan limbah rumah sakit karena limbah rumah sakit berbeda dengan limbah rumah tangga. Seperti telah diketahui bahwa limbah rumah sakit terdiri dari sisa organ tubuh manusia, sisa alat-alat kesehatan yang bersifat tajam, dan sisa obat-obatan yang bersifat racun, yang pada umumnya mengandung bibit penyakit dan radioaktif yang berbahaya bagi lingkungan dan masyarakat.

Lebih lanjut, fakta di Indonesia memperlihatkan bahwa peningkatan jumlah pelayanan kesehatan terjadi setiap tahun (Fatwadi, Handajani, & Fitriah, 2016). Namun, peningkatan ini tidak sesuai dengan peningkatan fasilitas dan infrastruktur pengelolaan limbah yang dimiliki rumah sakit (Chaerul, Tanaka, & Shekdar, 2008). Oleh karena itu, merupakan hal yang sangat penting bagi institusi pelayanan kesehatan untuk bersikap akuntabel terkait pengelolaan limbah medis agar tidak merugikan sosial dan lingkungan. Di samping itu, ketidakpatuhan rumah sakit terhadap peraturan pengelolaan limbah yang tepat dapat dilihat sebagai dampak dari pola pikir akuntabilitas yang masih mengedepankan kepentingan dan hubungan manusia (antroposentris). Akuntabilitas merupakan solusi yang dapat menjembatani kesenjangan antara kepentingan rumah sakit dan kepentingan masyarakat sosial. Hal ini disebabkan karena akuntabilitas dapat mendorong pelaku bisnis untuk berperilaku etis, dan memiliki kepedulian terhadap lingkungan eksternal organisasi. Begitu menariknya konsep akuntabilitas secara normatif, tetapi tidak mudah untuk menguraikan konsep akuntabilitas menjadi tindakan perilaku. *It needs to be 'filled' with a good helping of contextual and cultural details before it can be operationalized* (Pollitt & Hupe, 2011).

Upaya untuk memperkecil penyimpangan tersebut dilakukan dengan memasukkan nilai ketuhanan dalam konsep akuntabilitas. Idealnya konsep akuntabilitas secara implementatif dapat mendorong terwujudnya keseimbangan informasi dalam pengungkapan pengendalian limbah, yaitu informasi ekonomi dan informasi nonekonomi. Kedua jenis informasi ini merupakan informasi yang memiliki kedudukan yang sejajar dan diakui oleh manajemen sebagai informasi pendukung dalam proses pengambilan

keputusan manajemen (Dillard & Roslender, 2011). Oleh sebab itu, konsep akuntabilitas berdasarkan nilai mulat sarira meyakini adanya unsur Tuhan melalui prinsip *Tri Hita karana* (Tuhan, alam, dan manusia).

Akuntabilitas yang dibangun atas dasar nilai *mulat sarira* dapat menjadi solusi atas fenomena yang menjadi pemberitaan di media massa tentang beredarnya limbah medis (dari rumah sakit) di masyarakat yang digunakan sebagai bahan baku mainan anak-anak (Ananth, Prashanthini, & Visvanathan, 2010). Sangat tidak lazim apabila limbah yang termasuk bahan berbahaya dan beracun tersebut dapat lolos dari pengawasan pihak rumah sakit dan dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Akibat dari hal ini adalah masyarakat dan lingkungan akan dengan mudah terpapar penyakit dan zat berbahaya yang berasal dari limbah tersebut. Terkait dengan hal itu, saat ini isu tentang pengelolaan limbah medis rumah sakit telah menjadi sorotan masyarakat. Seperti telah diketahui bahwa pengelolaan limbah medis rumah sakit sepenuhnya diatur oleh manajemen rumah sakit (Sudiharti, 2012). Pihak manajemen rumah sakit tidak dapat lagi menutup mata terhadap dampak limbah medis mereka. Bagaimana pun juga, pihak manajemen rumah sakit harus bertanggung jawab terhadap limbah medis yang mereka hasilkan dengan cara melakukan pengelolaan yang tepat terhadap limbah medis sesuai dengan syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah.

Konsep akuntabilitas yang dibangun berdasarkan nilai mulat sarira mendorong terwujudnya keseimbangan informasi positif dan negatif dalam pengungkapan pengendalian limbah. Oleh karenanya, akuntabilitas ini tidak lagi hanya menjadi alat pengendali kepatuhan organisasi terhadap regulasi pemerintah (khususnya untuk kepentingan memperoleh legitimasi dan reputasi, seperti penghargaan akreditasi Rumah Sakit pada institusi Rumah Sakit), tetapi juga menjadi alat pengendali perilaku organisasi dalam menjaga kebaikan masyarakat dan lingkungan. Hal ini menunjukkan bahwa akuntabilitas yang diinternalisasi oleh nilai mulat sarira dapat meminimalkan perilaku aktor yang masih mengabaikan dampak negatif limbah medis terhadap lingkungan.

Nilai-nilai *mulat sarira* meyakini bahwa di alam semesta terdapat hubungan antara manusia dengan sesamanya, manusia dengan lingkungan, dan manusia dengan Tu-

han. Tiga hubungan ini dikenal dengan istilah *Tri Hita karana* yang saling berkaitan erat satu dengan yang lainnya. Keterkaitan hubungan ini memberi pemahaman bahwa manusia, sebagai makhluk yang tidak sempurna, harus selalu melakukan introspeksi diri. Dalam hal menjalankan usaha rumah sakit, jasa yang kesehatan diberikan dapat memberi dampak buruk pada lingkungan melalui limbah medis yang dihasilkan. Ataupun juga, pasien dan keluarganya tidak berkenan dengan jasa yang diberikan. Artinya, diketahui atau tidak, sesungguhnya terdapat hal-hal yang dapat merusak hubungan-hubungan tersebut. Manajemen menyadari hal tersebut dan bertekad untuk mengevaluasi kekurangan diri sendiri, dan kemudian berupaya dengan sungguh-sungguh untuk memperbaikinya demi mempertahankan kehormatan dan harga diri organisasi. Kritik dari pihak eksternal, baik dari pasien dan keluarganya maupun dari badan lingkungan hidup, dijadikan sebagai bahan baku yang sangat bernilai untuk menuju perbaikan.

Perbaikan diri yang diupayakan oleh perusahaan adalah tercapainya keseimbangan dan keharmonisan hubungan dengan sesama, dengan lingkungan, dan dengan Tuhan. Menjaga keharmonisan dengan sesama dan lingkungan merupakan representasi dari bagian hubungan dengan Tuhan. Oleh sebab itu, mencapai keharmonisan hubungan dengan sesama melalui pengelolaan dampak lingkungan dilakukan perusahaan dengan bekerja sama dengan pihak eksternal yang lebih profesional dalam pengelolaan limbah. Pelibatan pihak profesional yang telah diakui mumpuni memberikan pendampingan kepada organisasi merupakan bentuk komitmen perusahaan. Pihak ketiga ini diyakini lebih memahami prosedur pengelolaan limbah medis yang tepat. Pelibatan pihak ketiga memperlihatkan kesungguhan organisasi untuk mengelola limbah medisnya, sekaligus menjadi media pembelajaran organisasi memperkaya pengetahuan tentang dampak limbah medis dan prosedur penanganannya. Perbaikan diri menuju keseimbangan ini membutuhkan komitmen manajemen. Nilai ini dikenal dengan *ajeg*, yaitu komitmen untuk menjaga keharmonisan hubungan dengan sesama, dengan lingkungan dan dengan Tuhan.

Di samping itu, kerja sama dengan pihak ketiga memperlihatkan perilaku dinamis dan keterbukaan pikiran untuk meneri-

ma perubahan-perubahan sosial. Organisasi juga mengedepankan sikap transparansi atas pengelolaan limbah yang telah dilakukan. Oleh sebab itu, setiap evaluasi kinerja lingkungan yang diperoleh dari pengawas lapangan badan lingkungan hidup selalu dikonsultasikan kepada pihak ketiga yang profesional. Perilaku yang dinamis dan sikap transparan ini merupakan bentuk lain dari komitmen manajemen terhadap pencapaian kinerja lingkungan yang seimbang. Selain itu, sikap dinamis dan transparan dilandasi oleh nilai budaya *Jengah*, yaitu rasa malu karena tidak mampu memberikan upaya dan tindakan terbaik untuk mencapai keharmonisan hubungan seperti yang diajarkan oleh *Tri Hita Karana*. Budaya *Jengah* dapat meminimalisasi perilaku kebohongan publik terhadap informasi lingkungan yang dilakukan perusahaan.

Komitmen untuk selalu bersikap dinamis dan transparan dilandasi oleh keyakinan dan kecerdasan spiritual bahwa segala hal terbaik yang dilakukan akan mendapat restu dari Tuhan. Oleh sebab itu, perilaku pengabaian terhadap dampak limbah medis yang bersifat merusak dan merugikan masyarakat dan lingkungan harus diminimalisasi. Desain bangunan Rumah Sakit Sehati sengaja menyediakan ruangan khusus untuk pelaksanaan ritual sembahyang. Hal ini mengimplikasikan bahwa manajemen menginginkan rutinitas ritual sembahyang dilakukan oleh seluruh personil organisasi. Keinginan manajemen ini bertujuan agar anggota organisasi memiliki kekuatan spiritual dan kekuatan internal yang dapat menjadi pendorong setiap individu dalam memberikan pelayanan terbaik. Perilaku ini dilandasi oleh nilai *Taksu*, yaitu keyakinan bahwa kesadaran spiritual dapat menjaga dan memupuk kesadaran atas komitmen organisasi dalam memberikan pelayanan terbaik dan melaksanakan peran dan fungsi yang memberikan manfaat bagi sesama.

Tujuan organisasi untuk memberikan pelayanan terbaik merupakan suatu proses pembelajaran secara terus-menerus. Terutama berkaitan dengan hal pengelolaan limbah medis, organisasi membutuhkan penelitian dan pembelajaran mengenai sejauh mana dampak limbah medis yang mereka hasilkan dan cara yang tepat untuk mengatasinya. Meski demikian, organisasi tidak melupakan tujuan lainnya yaitu untuk mencapai efisiensi biaya. Oleh karena itu, keseimbangan untuk dua hal ini dilakukan dengan menyelaras-

kan kepentingan sosial dan kepentingan organisasi. Kepentingan sosial selalu berubah dan organisasi harus beradaptasi dengan perubahan tersebut. Dalam hal ini muncul nilai *desa kala patra*, yaitu keterbukaan untuk belajar secara terus menerus dalam merespon perubahan sosial yang memperlihatkan kemampuan perusahaan untuk beradaptasi. Di samping itu, perubahan sosial tersebut direspon secara selektif dengan menentukan prioritas jangka pendek dan jangka panjang menuju keseimbangan kepentingan lingkungan, sosial, dan organisasi.

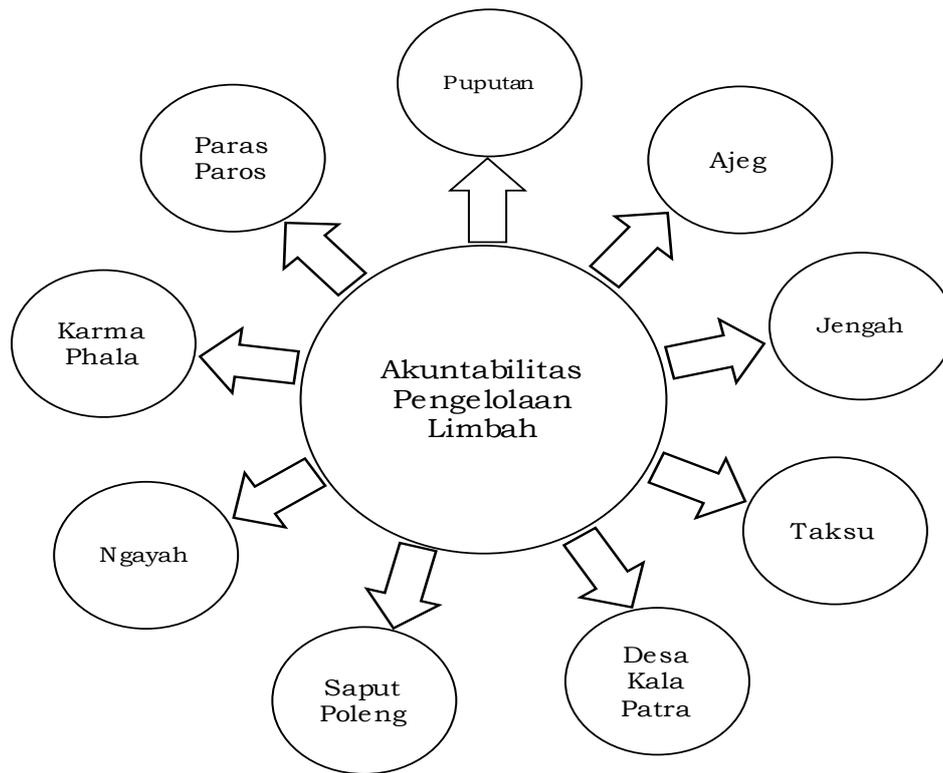
Tantangan terbesar bagi organisasi dalam merespon perubahan eksternal adalah kesiapan diri masing-masing anggota organisasi terhadap tekanan dan “gesekan” sosial yang terjadi. Misalnya, dalam hal pengelolaan limbah yang melibatkan pihak pengawas dari badan lingkungan hidup, yang sering memberi tekanan kepada organisasi mengenai kualitas pengelolaan limbah yang mereka lakukan. Tekanan tersebut dapat melemahkan kepercayaan diri anggota organisasi jika mereka tidak mampu mengelola diri sedemikian rupa. Keyakinan bahwa nilai *saput poleng* adalah suatu keniscayaan dalam setiap diri manusia dan hal tersebut merupakan hukum Tuhan di alam semesta, dapat menjadi tameng organisasi dalam menyikapi secara bijak setiap keadaan baik dan buruk, serta suasana suka dan duka yang terjadi. Kebijakan manajemen dalam konteks pengelolaan limbah medis menghasilkan rumusan prioritas capaian organisasi dalam menyelaraskan tujuan untuk merespon tekanan regulator mengenai dampak kualitas lingkungan hidup dan tujuan untuk kepentingan investor. Kebijakan ini berada pada titik tengah tanpa mengabaikan salah satu kepentingan dari beberapa tujuan yang akan dicapai organisasi.

Pencapaian pada keseimbangan kepentingan-kepentingan yang sangat plural dilakukan oleh manajemen dengan sifat *ngayah*, penuh ketulusan. Perilaku *ngayah* selain dapat menyeimbangkan pencapaian untuk kepentingan eksternal juga dapat menjadi solusi atas ego sektoral yang sering terjadi antardivisi dalam organisasi. Ego sektoral antardivisi dapat menghambat kinerja organisasi secara keseluruhan sehingga untuk menyasiasi permasalahan tersebut manajemen memberikan pemahaman atas kesadaran *ngayah*. Manajemen memberikan pemahaman bahwa bisnis rumah sakit merupakan bisnis yang bertu-

juan mulia, menuntut perhatian yang besar dan rasa kasih sayang dan jiwa sosial yang tinggi pada pasien. Oleh karenanya sangat penting untuk melaksanakan tugas masing-masing dengan hati yang tulus, tanpa mengabaikan kepentingan bersama. Pemahaman ini diberikan secara konsisten melalui sistem keteladanan dan pelatihan. Ketulusan melaksanakan tugas terefleksi pada wajah, dan menurut Samra-Fredericks (2010) hal tersebut merupakan bagian dari implementasi dari praktik akuntabilitas yang bermoral.

Tugas dan pekerjaan yang dilaksanakan dengan hati yang tulus merupakan sifat dan perbuatan yang baik. Selanjutnya, hal-hal baik yang dilakukan akan mendatangkan *Karmaphala* yang baik, dan begitupun sebaliknya. Dalam hal pengelolaan limbah medis, organisasi memiliki peluang dan kesempatan untuk mengabaikan regulasi lingkungan yang dirasakan cukup membebani organisasi. Meskipun demikian, perusahaan berupaya melaksanakan regulasi sebagaimana seharusnya, tetapi disesuaikan dengan kemampuan organisasi pada saat itu. Manajemen meyakini bahwa kemampuan organisasi untuk melaksanakan pengelolaan limbah medis yang tepat akan dapat terus meningkat jika upaya mematuhi regulasi dilakukan secara maksimal dan terus menerus. Hal ini disebabkan untuk mewujudkan rumah sakit yang ramah lingkungan merupakan suatu proses pembelajaran. Substansi dari nilai *karmaphala* adalah tindakan yang baik dalam melaksanakan praktik pengelolaan limbah. Keyakinan *karmaphala* dari tindakan yang baik akan membawa hal yang baik merupakan cerminan dari keyakinan religius dan filosofi pribadi para aktor (Parker, 2014). Dengan pemahaman tersebut organisasi dapat melaksanakan pengelolaan limbah dan menyiapkan laporannya semaksimal mungkin sesuai dengan upaya dan usaha terbaik yang dimiliki perusahaan pada saat itu.

Akuntabilitas organisasi yang baik dapat terwujud dengan kerja sama staf dan manajemen dalam melaksanakan praktik pelayanan kesehatan yang beretika. Kerja sama antarpersonil staf dan manajemen didasarkan pada semangat untuk menjaga kekompakan personil organisasi sebagai sebuah tim. Pihak manajemen menyadari bahwa perbedaan status, golongan, pendidikan, ataupun keahlian merupakan tantangan bagi organisasi agar dapat bersinergi. Tim organisasi yang bersinergi menjadi penggerak pertumbuhan organisasi yang lebih



Gambar 1. Akuntabilitas Berbasis Nilai-Nilai *Mulat Sarira*

cepat sehingga manajemen merasa perlu untuk memupuk perilaku *paras paros* atau saling menghargai antar sesama anggota organisasi untuk mencapai tujuan dan kepentingan bersama. Berdasarkan pembahasan pada bagian ini, maka akuntabilitas yang berlandaskan pada nilai-nilai *mulat sarira* dapat diilustrasikan pada Gambar 1.

SIMPULAN

Penelitian ini menemukan bahwa akuntabilitas pengelolaan limbah berbasis *mulat sarira* memiliki kandungan nilai-nilai berikut pertama, *puputan* yang mencerminkan semangat dan tindakan habis-habisan untuk menjaga kehormatan, martabat, dan etika organisasi sebagai partisipan yang ikut serta menjaga kelestarian lingkungan. Kedua, nilai *ajeg* yang mencerminkan suatu bakti kepada Tuhan dengan menjaga keharmonisan dan keseimbangan hubungan dengan sesama makhluk. Bentuk bakti tersebut dilakukan dengan mengakui bahwa unsur nonmanusia memiliki hak yang sama untuk dapat hidup dengan baik. Ketiga, nilai *jengah* yaitu rasa malu atas ketidakmampuan menjaga keseimbangan alam. Nilai ini mendorong munculnya perilaku akuntabel

yang berasal dari dalam diri aktor, tanpa adanya tekanan eksternal. Keempat, nilai *Taksu* yang berarti keyakinan spiritual, yang berasal dari kekuatan pikiran dan kesadaran pribadi yang mendalam tentang kewajiban melayani masyarakat sebagai bagian dari bakti kepada Tuhan. Kelima, nilai *desa kala patra* yaitu bijak beradaptasi, fleksibel, dinamis, belajar terus menerus, dan selektif. Nilai *desa kala patra* ini mendorong aktor untuk berpikiran terbuka dalam menerima perubahan. Keenam, nilai *saput poleng* dalam konsep akuntabilitas menuntut perilaku aktor yang mampu menyeimbangkan kepentingan organisasi dan kepentingan lingkungan. Ketujuh, nilai *ngayah* yang berarti melaksanakan kewajiban sosial dengan hati yang tulus. Kedelapan, nilai *karmaphala* yaitu hukum sebab akibat, yaitu apapun yang diperbuat akan mendatangkan hasil yang sepadan. Akuntabilitas terhadap pengelolaan limbah, dapat dilakukan dengan berbagai cara. Namun, kebijakan dalam memilih cara yang tepat dan sesuai merupakan hal yang penting bagi organisasi. Kesembilan, nilai *paras paros* yang berarti saling menghargai. Pencapaian tujuan organisasi dapat diwujudkan dengan kerja sama antardivisi,

dan dukungan seluruh staf dan manajemen.

Budaya mulat sarira sebagai salah satu nilai filosofi budaya Bali memiliki kandungan nilai turunan. Nilai ini menjadi panduan dalam memahami hakikat hidup, introspeksi diri, dan pengendalian diri. Oleh karena itu, apabila akuntabilitas pengelolaan limbah tidak didasarkan *mulat sarira*, maka pelaksanaan akuntabilitas pengelolaan limbah hanya dilakukan berdasarkan aturan, tanpa kesadaran untuk mengendalikan diri. Dalam hal ini akuntabilitas pengelolaan limbah berbasis *mulat sarira* merupakan suatu bentuk cinta kasih, dan pertanggungjawaban pada sesama, makhluk hidup lain, lingkungan, dan Tuhan. Hal ini menunjukkan bahwa *mulat sarira* mengingatkan manusia bahwa dalam melaksanakan aktivitasnya termasuk akuntabilitas pengelolaan limbah untuk tidak mementingkan diri sendiri, tetapi harus mengutamakan kebermanfaatannya untuk kepentingan bersama, yaitu Tuhan, manusia, dan alam. Di sisi lain, kesadaran melaksanakan akuntabilitas pengelolaan limbah berbasis *mulat sarira* mampu menggerakkan SDM dengan lebih optimal. Oleh karena itu, nilai *mulat sarira* ini perlu diinternalisasi oleh semua elemen SDM dan diintegrasikan dalam pelaksanaan akuntabilitas pengelolaan limbah.

Dari temuan penelitian ini dapat dilihat bahwa *mulat sarira* mampu menggerakkan hakikat diri dalam membina hubungan yang seimbang dan harmonis dengan sesama, makhluk hidup lain, lingkungan, dan Tuhan. Nilai-nilai akuntabilitas ini dibangun dari kearifan *mulat sarira* yang dimiliki oleh masyarakat Bali. Sementara itu, *mulat sarira* itu sendiri merupakan kearifan yang dilandasi oleh ajaran *Tri Hita Karana* yang merupakan ajaran yang menjaga keseimbangan hubungan antara Tuhan, alam dan manusia. Artinya, unsur nonmanusia, yaitu Tuhan dan alam merupakan bagian pilar yang menjadi pijakan ajaran *Tri Hita Karana*. Dengan demikian, konsep akuntabilitas yang dibangun dari kearifan *mulat sarira* mampu mengisi kekosongan konsep akuntabilitas yang ada selama ini, karena konsep akuntabilitas *mulat sarira* memiliki substansi nilai perilaku yang berorientasi dalam menjaga hubungan Tuhan, alam, dan manusia

DAFTAR RUJUKAN

Ananth, A. P., Prashanthini, V., & Visvanathan, C. (2010). Healthcare Waste Management in Asia. *Waste Manage-*

ment, 30(1), 154-161. <https://doi.org/10.1016/j.wasman.2009.07.018>

- Bebbington, J., & Larrinaga, C. (2014). Accounting and Sustainable Development: An Exploration. *Accounting, Organizations and Society*, 39(6), 395-413. <http://doi.org/10.1016/j.aos.2014.01.003>
- Bovens, M. (2007). Analysing and Assessing Accountability: A Conceptual Framework. *European Law Journal*, 13(4), 447-468. <http://doi.org/10.1111/j.1468-0386.2007.00378.x>
- Bovens, M. (2010). Two Concepts of Accountability: Accountability as a Virtue and as a Mechanism. *West European Politics*, 33(5), 946-967. <http://doi.org/10.1080/01402382.2010.486119>
- Byrch, C., Milne, M. J., Morgan, R., & Kearins, K. (2017). Seeds of Hope? Exploring Business Actors' Diverse Understandings of Sustainable Development. *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, 28(5), 928-963. <http://doi.org/10.1108/BFJ-09-2016-0438>
- Chaerul, M., Tanaka, M., & Shekdar, A. V. (2008). A System Dynamics Approach for Hospital Waste Management. *Waste Management*, 28(2), 442-449. <http://doi.org/10.1016/j.wasman.2007.01.007>
- Dillard, J., & Roslender, R. (2011). Taking Pluralism Seriously: Embedded Moralities in Management Accounting and Control Systems. *Critical Perspectives on Accounting*, 22(2), 135-147. <http://doi.org/10.1016/j.cpa.2010.06.014>
- Ebrahim, A. (2003). Making Sense of Accountability: Conceptual Perspectives for Northern and Southern Nonprofits. *Nonprofit Management & Leadership*, 14(2), 191-212.
- Fatwadi, Handajani, L., & Fitriah, N. (2016). Voluntary Report Berbasis Green Accounting. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 7(3), 364-381. <http://dx.doi.org/10.18202/jamal.2016.12.7027>
- Gibbon, J. (2012). Understandings of Accountability: An Autoethnographic Account Using Metaphor. *Critical Perspectives on Accounting*, 23(3), 201-212. <http://doi.org/10.1016/j.cpa.2011.12.005>
- Joannides, V. (2012). Accounterability and the Problematics of Accountability. *Critical Perspectives on Accounting*,

- 23(3), 244–257. <http://doi.org/10.1016/j.cpa.2011.12.008>
- Kurland, N. B. (2017). Accountability and the Public Benefit Corporation. *Business Horizons*, 60(4), 519–528. <http://doi.org/10.1016/j.bushor.2017.03.009>
- Lehman, G., & Kuruppu, S. C. (2017). A Framework for Social and Environmental Accounting Research. *Accounting Forum*, 41(3), 139–146. <http://doi.org/10.1016/j.accfor.2017.07.001>
- Lozano, R. (2012). Towards Better Embedding Sustainability into Companies' Systems: An Analysis of Voluntary Corporate Initiatives. *Journal of Cleaner Production*, 25, 14–26. <http://doi.org/10.1016/j.jclepro.2011.11.060>
- Muchlis, S., & Sukirman, A. S. (2016). Implementasi Maqashid Syariah dalam Corporate Social Responsibility di PT. Bank Muamalat Indonesia. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 7(1), 120-130. <http://dx.doi.org/10.18202/jamal.2016.04.7011>
- Nasir, M. (2012). Model Pengolahan Limbah Menuju Environmental Friendly Product. *BENEFIT: Jurnal Manajemen dan Bisnis*, 16(1), 58–68.
- Ossege, C. (2012). Accountability – Are We Better off Without It? An Empirical Study on the Effects of Accountability on Public Managers' Work Behaviour. *Public Management Review*, 14(5), 37–41. <https://doi.org/10.1080/14719037.2011.642567>
- Overduin, N., & Moore, M. L. (2017). Social License to Operate: Not a Proxy for Accountability in Water Governance. *Geoforum*, 85, 72–81. <http://doi.org/10.1016/j.geoforum.2017.07.008>
- Parker, L. D. (2011). Twenty-one Years of Social and Environmental Accountability Research : A Coming of Age. *Accounting Forum*, 35(1), 1–10. <http://doi.org/10.1016/j.accfor.2010.11.001>
- Parker, L. D. (2014). Corporate Social Accountability through Action: Contemporary Insights from British Industrial Pioneers. *Accounting, Organizations and Society*, 39(8), 632–659. <http://doi.org/10.1016/j.aos.2014.10.001>
- Patton, J. M. (1992). Accountability and Governmental Financial Reporting. *Financial Accountability and Management*, 8(3), 165-180. <http://doi.org/10.1111/j.1468-0408.1992.tb00436.x>
- Pollitt, C., & Hupe, P. (2011). Talking About Government. *Public Management Review*, 13(5), 641–658. <http://doi.org/10.1080/14719037.2010.532963>
- Rismawati. (2015). Memaknai Program Corporate Social Responsibility: Suatu Kajian Proses Transformasi Sosial Berbasis Kearifan Lokal. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 6(2), 245-253 <http://dx.doi.org/10.18202/jamal.2015.08.6020>
- Rodrigue, M. (2014). Contrasting Realities: Corporate Environmental Disclosure and Stakeholder-released Information. *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, 27(1), 119–149. <http://doi.org/10.1108/AAAJ-04-2013-1305>
- Samra-Fredericks, D. (2010). Ethnomethodology and the Moral Accountability of Interaction: Navigating the Conceptual Terrain of “Face” and Face-work. *Journal of Pragmatics*, 42(8), 2147–2157. <http://doi.org/10.1016/j.pragma.2009.12.019>
- Sudiharti, S. (2012). Hubungan Pengetahuan dan Sikap dengan Perilaku Perawat dalam Pembuangan Sampah Medis di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Yogyakarta. *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 6(1), 49–59.
- Sullivan, N. O., & Dwyer, B. O. (2009). Stakeholder Perspectives on a Financial Sector Legitimation Process: The Case of NGOs and the Equator Principles. *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, 22(4), 553–587. <http://doi.org/10.1108/09513570910955443>
- Thomas, T. E., & Lamm, E. (2012). Legitimacy and Organizational Sustainability. *Journal of Business Ethics*, 110(2), 191–203. <http://doi.org/10.1007/s10551-012-1421-4>
- Toms, S., & Shepherd, A. (2017). Accounting and Social Conflict: Profit and Regulated Working Time in the British Industrial Revolution. *Critical Perspectives on Accounting*, 49, 57-75. <http://doi.org/10.1016/j.cpa.2017.03.002>
- Tsakona, M., Anagnostopoulou, E., & Gidarakos, E. (2007). Hospital Waste Management and Toxicity Evaluation: A Case Study. *Waste Management*, 27(7), 912–920. <http://doi.org/10.1016/j.wasman.2006.04.019>